

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 1 Nomor 1 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna

Ika Setiati Budi Utami

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ikasetiatibudiutami@gmail.com

Abstrak

Political parties as one of the national organizations formed by a group of citizens who have the same goal to fight for the aspirations of the people. Political parties are given a special purpose by Law No. 2/2011 concerning Political Parties, namely to increase the political participation of members and the community in the context of organizing political and governmental activities. The emergence of mass corruption cases that occurred in the city of Malang caused the level of public participation to decline so that the role of political parties is needed in increasing public participation through political education. The focus of the discussion in this study is the first role of political parties in increasing public participation in elections reviewed Law No. 2/2011 concerning Political Parties, the second are the factors which become obstacles and supporters of the role of political parties in increasing public participation, and the third is the role of political parties associated with the concept of Hasan Al-Banna. This type of research is empirical legal research with a sociological juridical approach. The data source used in the form of primary data sources obtained from interviews with the DPC PDI Malang City Struggle and the United Development Party DPC (PPP), while the secondary data source is Law Number 2/2011 concerning Political Parties. The results of this study are the role of political parties in the city of Malang in increasing public participation is to conduct political education to the community. Political education conducted by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) of Malang City is more focused on cadres while political education in the community has not been carried out properly. The role of PPP in increasing public participation by conducting political education is to provide political money socialization. Factors that hamper PDI Perjuangan are reduced public confidence, lack of political education, the community is still transactional. The supporting factor is the existence of a public figure that can help the level of community participation. Factors that hamper PPP are the people's distrust and the lack of seriousness of the candidates. The role of the PDI Perjuangan party in Malang if related to the Hasan Al-Banna concept is only the aspect of the emergence of community participation (musyarokah siyasiah) which is fulfilled and the role of PPP has not fulfilled aspects of the Hasan Al-Banna concept.

Partai politik sebagai salah satu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara yang mempunyai tujuan yang sama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai politik diberikan tujuan khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Munculnya kasus korupsi massal yang terjadi di Kota Malang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat menurun sehingga diperlukan peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik. Adapun fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu ditinjau UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang kedua adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang ketiga adalah peran partai politik dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan DPC PDI Perjuangan Kota Malang dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan sumber data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hasil dari penelitian ini adalah peran partai politik di Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Malang lebih terfokus kepada kader sedangkan pendidikan politik pada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Peran PPP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendidikan politik yaitu memberikan sosialisasi money politik. Faktor yang menjadi penghambat PDI Perjuangan ialah kepercayaan masyarakat berkurang, belum adanya pendidikan politik, masyarakat masih transaksional. Faktor pendukung ialah adanya publik figure yang bisa membantu tingkat partisipasi masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat PPP adalah ketidakpercayaan masyarakat dan kurang seriusnya para calon. Peran partai PDI Perjuangan Kota Malang jika dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna hanya aspek munculnya partisipasi masyarakat (musyarokah siyasiyah) yang terpenuhi dan peran PPP belum memenuhi aspek-aspek dari konsep Hasan Al-Banna.

Kata Kunci: Peran, Partai Politik, Pendidikan Politik, Partisipasi

Pendahuluan

Partai politik pada era demokrasi modern, saat ini dipandang sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat adil dan makmur. Indonesia adalah salah satu negara yang juga menerapkan sistem politik demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, sehingga partai politik adalah institusi yang di anggap penting dan *sine qua non* dalam mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat.¹ Partai politik mempunyai tujuan dan fungsi secara umum, tujuan umum yaitu; a). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaskud dalam Pembukaan Undang Undang b). menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c). mengembangkan

¹Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, 44.

kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya tujuan khususnya adalah a). meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan b). memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara c). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menyatakan angka partisipasi masyarakat dalam pilpres pada tahun 2014 sebesar 72,94%, sedangkan pada pemilu legislatif 2014 jumlah pemilih secara keseluruhan sebanyak 621.115 sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya 410.929, jadi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 210.186. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang pada pemilihan umum 2019 tercatat tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif sebanyak 76,65%, sedangkan pada partisipasi pada pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 78.68%.³ Jadi tingkat partisipasi yang terjadi pada 2019 mengalami kenaikan jumlah partisipan masyarakat dalam mengikuti kontestasi pemilu di Kota Malang.⁴

Kasus korupsi berjamaah di dalam lembaga legislatif Kota Malang meninggalkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif khususnya di Kota Malang. Lembaga eksekutif dan legislatif Kota Malang yang terpilih di pemilu 2019 harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat Kota Malang. Tidak hanya mengembalikan kepercayaan publik, tetapi juga kepercayaan terhadap partai politik.⁵ Adapun fenomena yang terjadi di pemerintahan Kota Malang yaitu kasus korupsi massal yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Malang karena pejabat-pejabat pemerintahan diusung oleh partai politik yang ada. Pejabat pemerintahan dalam lembaga legislatif dan eksekutif yang seharusnya mengemban amanat tetapi kepercayaan masyarakat sudah dicerai dengan kasus korupsi massal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁶ Penelitian menggambarkan secara detil dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.⁷ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁸ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu

²Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

³Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

⁴<http://kpud-malangkota.go.id/dokumen> , diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

⁵<https://www.google.com/amp/jatim.tribunnews.com/amp/2018/09/11/anggota-dprd-kota-malang-siap-jawab-kepercayaan-dengan-kerja-keras>, diakses 5 Februari 2019.

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 5.

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

⁸Usman Husaini, Purnomo Setiady akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

di Kota Malang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Malang. Pada penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Adapun Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini yang bertetempat di DPC PDI Perjuangan Kota Malang yang beralamat Jl. R. Panji Soeroso, No.5 C, Polowijen, Blimbing, Kota Malang dan DPC PPP Kota Malang yang beralamat Jl. Raden Panji Suroso No.5, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan, yaitu: I Made Riandiana Kartika selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Eko Hardiyanto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang dan Gufron Hariyanto selaku anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang.. Adapun data sekunder yang digunakan adalah Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, koran, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Hal ini peneliti menganalisis tentang Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum di Kota Malang.

Peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kota Malang ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau mengubah kebijakan yang akan dan telah diambil oleh supra struktur politik (pemerintahan). Partisipasi politik masyarakat terhadap PDI Perjuangan Kota Malang pada pemilihan umum 2019 mengalami kenaikan 16.784 perolehan suara. Pada pemilihan umum 2014 PDI Perjuangan Kota Malang memperoleh suara sebanyak 92.217, kemudian pada pemilu serentak 2019 memperoleh suara sebanyak 109.001.

Kenaikan perolehan suara ini tidak lepas dari kerja keras partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Apalagi pada tahun 2018 Kota Malang khususnya hampir seluruh anggota legislatif terlibat tindak pidana korupsi yang membuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Partisipasi politik masyarakat terhadap PPP di Kota Malang pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada pemilu 2014 PPP Kota Malang memperoleh suara sebanyak 23.273 dan

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 93.

mendapatkan 3 kursi pada jajaran legislatif kemudian pada pemilu serentak 2019 memperoleh suara sebanyak 11.596 dan tidak mendapatkan kursi sama sekali di jajaran legislatif.

Partai politik wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar dapat tercapainya pemilihan umum yang demokrasi sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20011 Tentang Partai Politik bahwasanya partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalm kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik yang apabila dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang ataupun sesuai dengan kebutuhan di daerahnya maka tujuan khusus dari partai politik yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat akan meningkat. Sehingga harus adanya peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Peran PDI Perjuangan Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pendidikan politik di tingkat cabang sampai anak ranting, kemudian langsung terjun ke masyarakat dalam memberikan pengarahan terhadap masyarakat yang mengarah dalam eksistensi PDI Perjuangan, dan penyampaian visi misi partai. Pola pendidikan politik yang diberikan PDI Perjuangan hanya terfokus kepada kader dan pengurus partai sedangkan pendidikan politik kepada masyarakat sering kali di abaikan.

Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan belum (PPP) maksimal dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Malang sesuai yang diamanatkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kurang maksimalnya pendidikan politik yang dilakukan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat sehingga pada pemilihan umum di tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mendapatkan kursi di DPRD Kota Malang.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Malang

Peran partai politik khususnya di Kota Malang dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu pada umumnya mempunyai kendala-kendala saat melaksanakannya. Peran PDI Perjuangan di Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mempunyai hambatan dalam melakukan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi langsung ke masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran PDI Perjuangan Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi yaitu, faktor penghambat yang pertama adalah ketidakpercayaannya masyarakat terhadap partai politik akibat tsunami politik. Kedua, tidak adanya pendidikan politik yang diberikan oleh PDI Perjuangan Kota Malang. Ketiga, mindset masyarakat beranggapan bahwa pesta demokrasi ajang untuk mencari uang. Selanjutnya faktor pendukung peran PDI Perjuangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terbantu karena public figure yang dimiliki PDI Perjuangan sendiri yaitu Pak Jokowi bisa membantu proses pemilihan legislatif dimana masyarakat sangat antusias datang ke TPS untuk melakukan pemilihan umum.

Faktor yang menjadi penghambat peran Partai Persatuan Pembangunan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan politik adalah proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan partai, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala sehingga hasilnya kurang maksimal. Kendala pertama, karena adanya pandangan yang negatif masyarakat terhadap partai politik. Pandangan masyarakat bahwa politik itu identik dengan uang, yang memiliki uang dapat memenangkan dalam politik. Banyaknya kasus korupsi yang menimpa kader partai politik yang duduk dalam pemerintahan dan sebagai anggota legislatif, membuat masyarakat menjadi antipati terhadap partai politik. Kendala kedua, kurangnya keseriusan dari para calon-calon legislatif. Para calon legislatif kurang memberikan usaha yang lebih dalam menarik simpati masyarakat.

Peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik (*Siyasah Tarbiyah*) menurut Hasan Al-Banna

Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui cara dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik adalah salah satu fungsi fundamental diantara berbagai dimensi lain pendidikan. Pendidikan politik pada dasarnya merupakan kebutuhan darurat dalam menyiapkan kaum muslimin untuk dapat mengemban tanggung jawab serta menunaikan hak dan kewajiban.

Pendidikan politik supaya mencapai sasaran yang tepat mencakup tiga aspek yaitu yang pertama, partai politik harus memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara supaya masyarakat memiliki kesadaran politik (*wah'yu siyasah*). Kedua, setelah partai politik memberikan wawasan kepada masyarakat akan tertanam keyakinan politik yang akan membentuk kepribadian politik (*dzat siyasiah*). Ketiga, munculnya partisipasi politik (*musyarokah siyasiah*) untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat, dan merupakan sarana untuk memperkokoh pemerintahan kolektif.¹⁰

Peran PDI Perjuangan di Kota Malang dalam menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat jika dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna, yang pertama, menumbuhkan kesadaran politik (*wah'yu siyasiah*) bahwa PDI Perjuangan belum memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara sehingga masih banyak masyarakat yang asal memilih tidak mengenal calon-calonnya. Kedua, kepribadian politik (*dzat siyasiah*) bahwa dengan tidak diberikannya wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat oleh PDI Perjuangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat sehingga tidak ada keyakinan politik. Ketiga, munculnya partisipasi politik (*musyarokah siyasiah*) tingkat partisipasi masyarakat terhadap PDI Perjuangan mengalami peningkatan karena dengan adanya publik figur yang dimiliki sehingga dapat menjadi pendorong jumlah partisipasi masyarakat.

Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Malang dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada masyarakat jika dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna, yang pertama yaitu kesadaran politik (*wah'yu siyasiah*) bahwa Partai Persatuan Pembangunan masih belum maksimal dalam menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat, belum mempunyai konsep yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai berbasis islam dan sudah lama dikenal oleh masyarakat khususnya yang beragama islam yang seharusnya memaksimalkan pemberian wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat. Kedua, kepribadian politik (*dzat siyasiah*) bahwa dengan tidak maksimalnya penyampain wawasan dan

¹⁰Fatahullah Jurdi, *Politik Islam Pengantar Pemikiran Politik Islam*, (Calpulis: Yogyakarta, 2016), 87-88.

pengetahuan yang diberikan sehingga akan menimbulkan tidak ada keyakinan dalam hal politik. Ketiga, munculnya partisipasi politik (*musyarokah siyasiyah*) belum dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap Partai Persatuan Pembangunan.

Kesimpulan

Peran DPC PDI Perjuangan dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Malang lebih terfokus kepada kader sedangkan pendidikan politik pada masyarakat belum terlaksana. Pendidikan politik yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hampir sama dengan PDI Perjuangan yang terfokus pada pendidikan pada kader, perbedaannya PPP memfokuskan sosialisasi terkait money politik pada masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran PDI Perjuangan Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi yaitu, faktor penghambat yang pertama adalah ketidak percayaannya masyarakat terhadap partai politik akibat tsunami politik. Kedua, tidak adanya pendidikan politik yang diberikan oleh PDI Perjuangan Kota Malang. Ketiga, mindset masyarakat beranggapan bahwa pesta demokrasi ajang untuk mencari uang. Faktor penghambat PPP Kota Malang yang pertama adalah tidak percayaannya pada partai politik. Kedua adalah kurangnya keseriusan calon dalam bersaing. Selanjutnya faktor pendukung peran PDI Perjuangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terbantu karena public figure yang dimiliki PDI Perjuangan sendiri yaitu Joko Widodo selaku calon presiden andalan masyarakat. Menurut Hasan Al-Banna peran partai politik supaya mencapai sasaran yang tepat mencakup tiga aspek yaitu kesadaran politik (*wah'yu siyasiyah*), membentuk kepribadian politik (*dzat siyasiyah*), partisipasi politik (*musyarokah siyasiyah*). PDI Perjuangan Kota Malang dalam konsep Hasan Al-Banna hanya memenuhi satu aspek yaitu munculnya partisipasi politik (*musyarokah siyasiyah*). Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam konsep Hasan Al-Banna belum memenuhi seluruh aspek.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Firmanzah. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 2011.

Husaini, Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Jurdi, Fatahullah. *Politik Islam Pengantar Pemikiran Politik Islam*. Calpulis: Yogyakarta. 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika. 2002.

Internet

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

<http://kpud-malangkota.go.id/dokumen> , diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

<https://www.google.com/amp/jatim.tribunnews.com/amp/2018/09/11/anggota-dprd-kota-malang-siap-jawab-kepercayaan-dengan-kerja-keras>.